

BAB V

UPAYA UNICEF DALAM MENANGANI PEKERJA ANAK DI INDIA PADA TAHUN 2018-2020

Fenomena pekerja anak telah merampas hak anak untuk bersekolah, mengekspos mereka pada kekerasan, dan memperkuat siklus kemiskinan antar generasi. Namun, pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia ini tidak dapat terelakkan. Pekerja anak dapat dicegah melalui pendekatan terpadu yang sekaligus dapat mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, serta memobilisasi dukungan publik untuk lebih peduli terhadap hak-hak anak. Jika dibandingkan dengan angka pekerja anak pada tahun 2000, saat ini pekerja anak di seluruh dunia sudah lebih menurun. Meskipun ini adalah berita positif, kemajuannya terlalu lambat. Karena adanya pekerja anak tidak hanya mengancam kesehatan dan kesejahteraan anak, tetapi juga mengancam perekonomian nasional dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan global. Pekerja anak didefinisikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh anak di bawah usia minimum yang dipersyaratkan. Konvensi Hak Anak mengakui hak setiap anak untuk dilindungi dari eksploitasi dan dari pekerjaan apapun yang mungkin berbahaya atau mengganggu Pendidikan anak atau membahayakan kesehatan anak (fisik, mental, perkembangan spiritual, moral atau sosial). Instrument internasional lainnya yang mendefinisikan lebih lanjut tentang hak anak yang harus dilindungi dari bentuk-bentuk pekerjaan untuk anak terutama dalam konflik bersenjata, eksploitasi seksual, dan pergadangan obat-obatan terlarang. Memahami penyebab yang mendasari pekerja anak dan mengatasi keterkaitan mereka adalah kunci di balik pencegahan dan tanggapan UNICEF tentang tindakan efektif terhadap pekerja anak yang harus disertai dengan mengatasi berbagai kerentanan yang dimiliki anak-anak dan harus menyadari bahwa keprihatinan yang lebih luas ini tidak selalu ditangani secara memadai dalam strategi yang ada. Misalnya, jumlah anak mengemis atau hidup di jalanan tidak bisa ditanggulangi tanpa berfokus pada masalah di rumah atau di sekolah yang sering memaksa mereka untuk akhirnya turun ke jalan. Contoh lain adalah, seorang anak yang bekerja menjadi pekerja seksual juga mungkin berkonflik dengan hukum atau mengalami kekerasan di

rumah, ditambah keadaan disabilitas juga menjadi mendukung adanya pekerja anak. UNICEF dan mitranya bekerja untuk memperkuat hukum, kerangka kebijakan, meningkatkan struktur dan layanan berbasis pemerintah dan masyarakat, serta aktif terlibat dengan masyarakat untuk mendorong perubahan sosial yang positif. UNICEF dan aktor perlindungan anak lainnya mulai membuat proyek khusus yaitu pendekatan sistem yang berfokus pada pencegahan terjadinya pekerja anak. Tujuan dari pendekatan sistem ini adalah untuk menciptakan lingkungan di mana anak-anak bebas dari kekerasan dan eksploitasi dan di mana hukum, layanan, perilaku, dan praktik meminimalkan kerentanan, mengatasi faktor-faktor penyebab, dan memperkuat ketahanan anak. Pendekatan sistem memfasilitasi pengembangan kebijakan yang lebih sistematis dan program yang mempertimbangkan anak, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Koordinasi yang lebih baik dalam pengentasan kemiskinan, kesejahteraan sosial, keadilan, tenaga kerja, dan kebijakan pendidikan memastikan efektivitas dan efisiensi biaya. Pendekatan sistem juga menangani pendorong sosial seperti marginalisasi dan diskriminasi berdasarkan ras, etnis, jenis kelamin, dan karakteristik lainnya. Guru dan orang-orang dalam sistem pendidikan dapat menjadi pendukung garis depan untuk melindungi anak-anak, meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap situasi di mana anak-anak menunjukkan tanda-tanda kesusahan atau menunjukkan bahwa mereka bekerja berjam-jam. Pemain penting lainnya adalah lembaga kesejahteraan anak, sektor kesehatan, penegak keadilan, pemuka agama, dan komunitas-komunitas lainnya yang berbasis sosial. Sistem perlindungan anak yang efektif meliputi (UNICEF, Child Labour and UNICEF in Action: Children at the Centre):

- Kerangka hukum dan kebijakan yang kuat, termasuk peraturan dan standar yang sesuai dengan Konvensi Hak Anak, serta standar internasional lainnya
- Regulasi dan pengawasan yang efektif untuk memastikan standar diterapkan secara efektif dan untuk memastikan standar yang diterapkan berjalan efektif
- Mekanisme pelayanan dan penyampaian layanan yang terdiri dari mekanisme sosialisasi tentang pencegahan dan direspon di tingkat kelembagaan dan struktural

- Kolaborasi dan koodinasi, misalnya antara aktor pemerintah dan non pemerintah terkait, antar kementrian dan departemen pemerintahan, dan antar sektor yang berbeda
- Pengetahuan dan data tentang isu-isu perlindungan anak dan praktik yang efektif untuk menginformasikan perkembangan kebijakan, advokasi, dan pemrograman berbasis bukti
- Sumber daya manusia dan keuangan, manajemen infrastuktur dan kapasitas

Perlindungan tenaga kerja di semua sektor, mampu merespon dan memberikan layanan yang sesuai. Hal ini membantu sistem perlindungan anak dalam mencerminkan norma-norma sosial masyarakat. Upaya yang ditunjukkan untuk memperkuat sistem tersebut sangat bergantung dengan upaya yang mendorong perubahan sosial untuk diwujudkan dalam mengakhiri eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Bukti menunjukkan bahwa keyakinan, sikap, dan praktik masyarakat dapat membentuk sikap dan praktik institusi, struktur dan layanan, begitu sebaliknya. Sebagai contoh, undang-undang baru untuk mencegah pekerja anak dapat berkontribusi pada perubahan positif dalam sikap terhadap pekerja anak dan anak-anak yang putus sekolah. Demikian pula, meningkatkan kesadaran tentang dampak berbahaya dari pekerja anak dapat membantu menantang asumsi tradisional. Salah satu contoh norma sosial yang merugikan anak-anak adalah kepercayaan umum bahwa anak perempuan lebih baik bekerja di rumah, yang akibatnya adalah menghambat mereka untuk mendapatkan haknya menerima pendidikan. Mengatasi norma ini akan berakibat positif di dunia Pendidikan dan membantu anak perempuan mengakhiri marginalisasi mereka. Anak perempuan hanyalah salah satu kelompok sasaran yang mungkin mendapat manfaat dari intervensi yang dikembangkan dalam kerangka pencegahan pekerja anak. Contoh lain program yang dirancang untuk mengatasi pekerja anak adalah penanggulangan kemiskinan rumah tangga atau menyediakan layanan pendidikan yang seringkali juga menguntungkan bagi anak-anak pribumi, anak-anak penyandang disabilitas, pengungsi, anak-anak tanpa orang tua, dan anak-anak korban perang. Analisis menyeluruh terhadap resiko masing-masing penyebab pekerja anak akan menentukan bagaimana kasus tersebut akan ditanggapi. Anak-anak memiliki

kekuatan untuk memainkan peran penting dalam mencegah dan menanggapi pekerja anak. Mereka adalah aktor kunci dalam pendekatan sistem dan dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana mereka memandang keterlibatan mereka dan apa yang mereka harapkan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Menghentikan pekerja anak merupakan salah satu target SDGs dengan mengambil tindakan segera yang efektif untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern dan perdagangan manusia serta mengamankan larangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tantara anak. SDG 8 dibentuk berdasarkan Pasal 32 Konvensi Hak Anak dan Konvensi ILO yang relevan dan mendukung komitmen untuk menghapuskan pekerja anak dengan fokus utama pada promosi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pekerjaan penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua pada tahun 2030. Kemudian target SDG 16.2 yang ditunjukkan untuk mengakhiri penyalahgunaan, eksploitasi, perdagangan manusia dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. SDG 1 tentang kemiskinan, SDG 2 untuk mengakhiri kelaparan dan gizi buruk, SDG 3 tentang Kesehatan, SDG 4 tentang Pendidikan, dan SDG 5 tentang mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk praktik-praktik berbahaya seperti pernikahan anak dan pencapaian kesetaraan gender (UNICEF). Saat ini, dunia tidak berada di jalur yang tepat untuk menghapus pekerja anak. Untuk memenuhi target ini, kemajuan global harus 18 kali lebih cepat daripada laju yang diamati selama dua dekade terakhir.

5.1 Pendekatan Multisektoral UNICEF untuk Mengakhiri Pekerja Anak di India

Menanggapi sifat tantangan yang beragam, UNICEF mempromosikan pendekatan multisektoral sejak tahun 2018 untuk mengakhiri pekerja anak yang mencakup program di sektor pendidikan, perlindungan sosial dan perlindungan anak. UNICEF juga mempromosikan pentingnya kebijakan pasar tenaga kerja dan praktik bisnis dalam menangani hak-hak anak secara holistik, termasuk akar penyebab pekerja anak dan lapangan pekerjaan yang layak untuk orang dewasa.

Kerja lintas sektoral UNICEF ini berpengaruh dengan gender, perubahan sosial dan perilaku yang berperan penting terhadap upaya ini.

Pekerja anak dan kurangnya pendidikan berjalan beriringan. Lebih dari seperempat anak berusia 5 hingga 11 tahun dan lebih dari sepertiga anak berusia 12 hingga 14 tahun tidak bersekolah meskipun India telah menerapkan kebijakan wajib sekolah. Masih banyak lagi anak-anak yang berjuang untuk menyeimbangkan tuntutan sekolah dan pekerja anak pada saat yang bersamaan. Akibatnya hak mereka tidak dapat terpenuhi secara maksimal. UNICEF mendukung perubahan sistemik untuk menangani pekerja anak melalui penguatan undang-undang dan kebijakan yang menjamin pendidikan bagi setiap anak. UNICEF juga membuat program antara negara dan masyarakat untuk mensosialisasikan tentang bahaya pekerja anak pada masyarakat sehingga masyarakat dapat terlibat dan mendukung mekanisme pemantauan berbasis masyarakat. Dukungan UNICEF untuk memerangi pekerja anak di India melalui pendidikan berfokus pada perluasan sekolah formal dan kesempatan pendidikan lainnya, reformasi untuk meningkatkan hasil belajar dan pengembangan keterampilan anak, serta meningkatkan intensif bagi keluarga untuk tetap menyekolahkan anak. Penelitian oleh UNICEF dan Pusat Evaluasi dan Pengembangan tentang apa penyebab dan konsekuensi pekerja anak di India, memberikan gambaran umum metode campuran yang komprehensif tentang masalah pekerja anak di India dan faktor kerentanan yang mendasari terkait dengan praktik pekerja anak. Melalui analisis statistik yang ekstensif, hal ini menunjukkan pentingnya status pendidikan kepala rumah tangga dan perang gender dalam pengambilan keputusan tentang pendidikan dan pekerja anak.

Perlindungan sosial memainkan peran penting dalam mengatasi kemiskinan yang menjadi faktor utama adanya pekerja anak. UNICEF mendukung pemerintah India untuk merancang, mengimplementasikan, dan memperkuat program perlindungan sosial inklusif dengan (UNICEF, Ending Child Labour through a Multisectoral Approach) :

- Memperkenalkan atau meningkatkan tunjangan anak universal atau uang transfer yaang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kehadiran di sekolah dan akses ke layanan kesehatan

- Mengadvokasi kebijakan yang ramah keluarga, khususnya bagi mereka yang bekerja di perekonomian rendah. Seperti contoh tunjangan kehamilan dan orang tua serta tempat pengasuh anak yang bersubsidi atau gratis
- Mengadakan program pemberian makan di sekolah dengan informasi, pelatihan, layanan atau dukungan untuk mengakses ruang aman dan jaringan sekolah bagi anak
- Mempromosikan pencatatan kelahiran melalui perlindungan sosial, termasuk melalui informasi dan layanan yang terkait dengan pengiriman bantuan tunai atau bentuk dukungan lainnya
- Menghasilkan keahlian dan bukti berdasarkan perlindungan sosial yang peka terhadap anak dan responsif gender untuk membantu merancang dan mengimplementasikan program perlindungan sosial, dan memantau dengan cermat dampaknya terhadap pekerja anak

Upaya UNICEF untuk membantu India dalam mengembangkan sistem perlindungan anak yang lebih kuat sangat penting untuk mengurangi pekerja anak. Undang-undang dan peraturan program yang ditujukan untuk menghapus pekerja anak merupakan landasan sistem perlindungan anak yang cukup efektif. UNICEF bekerja sama dengan India untuk mendukung pengembangan dan implementasi strategi tersebut. Sistem perlindungan anak merupakan inti dari pencegahannya, penanganan, dan penghapusan anak dari pekerja anak. Sistem ini mengidentifikasi, memberikan dukungan dan mengkoordinasikan layanan sosial untuk keluarga dan anak-anak yang beresiko dan terlibat dalam pekerja anak. Sistem perlindungan anak sering kali menjadi titik kontak pertama bagi anak-anak yang paling beresiko (anak-anak yang ada di jalanan, putus sekolah, dan lain-lain). Karena peran mendasar dalam memberikan dukungan langsung kepada anak-anak dan keluarga, UNICEF berperan untuk memperkuat jangkauan, kapasitas, dan pendanaan tenaga kerja layanan sosial untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk pekerjaan mereka.

5.2 Pendekatan Terpadu UNICEF

UNICEF mengenalkan pendekatan terpadu ini untuk menghilangkan pekerja anak, meningkatkan akses untuk pendidikan yang berkualitas, memperkuat perlindungan sosial, memperkuat inisiatif pengasuhan untuk mengatasi norma-norma sosial yang mendorong berkelanjutannya pekerja anak. Bagian ini akan menguraikan bidang-bidang utama yang memberikan titik masuk untuk menangani pekerja anak di India (UNICEF, UNICEF'S PLANS FOR THE INTERNATIONAL YEAR FOR THE ELIMINATION OF CHILD LABOUR).

- Pekerja Anak dan Pendidikan

Banyak anak-anak di India yang memiliki beban berat karena harus menanggung pekerjaan, pendidikan, dan pekerjaan rumah secara bersamaan, sehingga mereka kehilangan pemenuhan hak-haknya. Untuk meninformasikan kebijakan dan program yang efektif yang mengenali dan mengatasi resiko ini, diperlukan bukti yang lebih baik oleh UNICEF melalui program penelitian tentang Strategi Pendidikan untuk Mengatasi Pekerja Anak di India. Ini akan menghasilkan serangkain bukti, termasuk analisis hubungan pendidikan dan pekerja anak.

- Perlindungan Sosial yang Komprehensif

Perlindungan sosial yang komprehensif ini merupakan dampak intervensi pendidikan dan dinamika pekerja anak dalam konteks determinan sosial dan gender yang lebih luas. Dengan adanya perlindungan sosial dapat berkontribusi pada pengurangan faktor resiko, termasuk kekerasan, pernikahan anak, dan pekerja anak. UNICEF turut mensponsori laporan 'Perlindungan Sosial dan Perlindungan Anak' yang menggambarkan bagaimana pendekatan perlindungan sosial dapat berkontribusi pada perlindungan anak.

- Pekerja Anak dan Sektor Swasta

UNICEF menyadari kebutuhan untuk meningkatkan peran sektor swasta dalam mengapus pekerja anak. Secara global dan nasional, UNICEF bekerja dengan mitra untuk meningkatkan kesadaran dan mempromosikan tindakan untuk memajukan pekerjaan yang layak dan mencegah pekerja anak. Sebagai

contoh, UNICEF dan PBB Global Impact bersama-sama menulis laporan tentang ‘Tempat Kerja Ramah Keluarga’ yang menguraikan kebijakan dan praktik khusus yang diperlukan di sektor swasta untuk mendukung pekerja dan keluarga mereka dalam rantai pasokan global. UNICEF juga terlibat dalam sistem regulasi global dan penguatan kebijakan untuk mempromosikan perilaku bisnis yang bertanggung jawab sehingga minim pengaruhnya bagi anak-anak

- **Pekerja Anak dan Perlindungan Anak**

Pekerja anak ditangani melalui program perlindungan anak UNICEF yang sedang berlangsung, mulai dari mewajibkan pencatatan kelahiran dan menerbitkan akta kelahiran untuk memastikan anak-anak mendapatkan haknya. Karena dengan adanya program ini dapat memperkuat sistem pengawasan dan pemantauan ketenagakerjaan hingga menyediakan psiko-sosial bagi anak-anak yang mengalami pekerja anak.

- **Pekerja Anak dan Disabilitas**

Jutaan anak mendetita disabilitas fisik, kognitif, dan emosional dan banyak anak disabilitas terus dieksploitasi melalui pekerja anak. Pelanggaran hak asasi manusia ini seringkali melibatkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, seperti pekerjaan yang membahayakan, kerja paksa, bahkan perdagangan anak yang dapat menyebabkan cedera serius, eksploitasi seksual, dan kematian. Advocacy Brief UNICEF berusaha untuk memahami hubungan antara pekerja anak dan disabilitas di Asia Selatan khususnya India dan merekomendasikan tindakan terkoordinasi untuk mengatasi akar masalahnya.

- **Pekerja Anak dan Migrasi**

Efek migrasi kerja pada anak-anak sangat luas. Migrasi untuk bekerja terjadi secara internal, dari pedesaan ke perkotaan maupun secara eksternal untuk pekerjaan lintas batas dan luar negeri. Sementara beberapa anak bermigrasi dengan keluarga mereka yang lain mungkin terpisah atau tidak ditemani, seringkali di luar jangkauan layanan dan perlindungan sosial dasar. Laporan Migrasi untuk Pekerjaan UNICEF dengan fokus pada Asia Selatan, memberikan rekomendasi bagi sektor publik dan swasta untuk bekerja sama

melindungi semua pekerja dan keluarga mereka di berbagai bidang termasuk pekerjaan, perekrutan, pengiriman uang, layanan dasar, dan perlindungan sosial.

5.3 Himbauan UNICEF untuk Bertindak dalam Menghilangkan Pekerja Anak

Tindakan mendesak diperlukan untuk mengakhiri bentuk-bentuk pekerja anak melalui pencegahan dan program-program untuk perawatan dan reintegrasi psikososial mereka. Sebagai contoh memberikan perhatian lebih kepada anak perempuan, penyandang disabilitas, anak migran, anak jalanan, dan anak-anak dilingkungan kerja informal. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak harus segera dihapuskan sebagai prioritas utama. Negara-negara harus memastikan implementasi penuh dari penegakan instrument hak asasi manusia internasional yang relevan. Mengoprasikan standar-standar ini membutuhkan pengarahan tenaga kerja perlindungan anak yang kuat untuk menyediakan dan memfasilitasi layanan individual kepada anak-anak dan keluarga, serta upaya penguatan sistem perlindungan anak nasional yang lebih luas dan langkah-langkah multi-sektor yang akan diuraikan dibawah ini.

- **Mempermudah Kebutuhan Sekolah dan Membuat Pendidikan Inklusif Dapat Diakses**

Ada solusi untuk mendapatkan dan mempertahankan anak-anak di sekolah, yaitu menyelaraskan usia kerja minimum, wajib belajar, memastikan akses ke layanan pengembangan anak usia dini, penitipan anak dan pendidikan pra-sekolah dasar yang meningkatkan peluang bahwa siswa tidak hanya tinggal di sekolah, tetapi juga berhasil membentuk karakter seorang anak. Penghapusan biaya sekolah dan pengapusan biaya untuk buku pelajaran, seragam, dan transportasi membuat pendidikan lebih mudah dijangkau. Tunjangan anak universal dapat membantu mengimbangi biaya tersebut. Strategi lain yang dapat berkontribusi pada keterlibatan berkelanjutan di sekolah meliputi: layanan berbasis sekolah multisektoral seperti program pemberian makanan bergizi, dukungan pengasuh anak dan layanan kesehatan. Menyediakan kesempatan kerja dan pelatihan adalah kunci untuk

mendukung tansisi dari dunia sekolah ke dunia kerja. Pertimbangan penting lainnya adalah memberikan informasi kepada anak-anak dan orang tua mereka tentang kembalinya Pendidikan dan membangun kesadaran tentang hak-hak anak. Pemerintah juga harus meningkatkan jalur pembelajaran yang fleksibel termasuk layanan remedial dan pendidikan khusus; dan program untuk populasi yang paling rentan seperti anak jalanan atau mereka yang berada dalam konteks migrasi. Pembelajaran digital harus diintegrasikan ke dalam pendidikan untuk meningkatkan jangkauan dan fleksibilitas kesempatan pendidikan.

- **Perkuat Perlindungan Sosial dan Dukungan Pekerjaan yang Layak Bagi Orang Dewasa**

Bantuan tunai harus dilengkapi dengan layanan terpadu termasuk di bidang pendidikan dan perlindungan anak. Penting untuk memantau secara dekat dampak program perlindungan sosial terhadap pekerja anak, untuk memastikan bahwa rancangan program, seperti jumlah, frekuensi dan jenis layanan cukup untuk mengimbangi biaya peluang yang dihadapi keluarga dalam menyekolahkan anak-anak mereka sehingga dapat berkontribusi dalam pengurangan pekerja anak. Investasi yang memadai dalam ekonomi pengasuhan juga merupakan kontribusi penting, seperti melalui layanan pengasuhan anak yang disubsidi oleh negara atau bisnis di tingkat masyarakat atau di tempat kerja. Memastikan pekerjaan yang layak untuk orang dewasa dan pemuda termasuk pemberian upah yang adil dapat membantu keluarga menghindari pekerja anak yang didorong oleh faktor kemiskinan.

- **Daftarkan Setiap Anak Saat Lahir**

Pencatatan kelahiran sangat penting untuk memastikan akses anak-anak ke pelayanan sosial lainnya dan melindungi mereka dari eksploitasi dan penyalahgunaan. Negara harus mengadopsi kebijakan dan undang-undang untuk pendaftaran gratis dan universal; menghubungkan pencatatan sipil dengan sistem yang berhubungan termasuk manajemen identitas, kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan sebagai titik masuk untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan anak; berinvestasi dalam teknologi yang aman dan inovatif untuk memfasilitasi pencatatan kelahiran dan memastikan

pencatatan yang tepat waktu, akurat dan permanen; dan melibatkan masyarakat dan keluarga, terutama yang sulit di jangkau untuk mendorong pendaftaran bagi setiap anak melalui sosialisasi tentang manfaatnya.

- **Memperkuat Sistem Perlindungan Anak**

Penguatan sistem perlindungan anak harus diprioritaskan, termasuk berinvestasi dalam tenaga kerja layanan sosial untuk pencegahan dan respon perlindungan anak yang cepat dan layanan lain untuk mempermudah akses perlindungan anak. Menanggapi pekerja anak juga harus disertai dengan pelarasan sistem perlindungan anak dengan sistem untuk menegakkan standar ketenagakerjaan. Baik undang-undang perlindungan anak maupun undang-undang perburuhan harus memperluas perlindungan legislatif yang memadahi. Layanan perlindungan anak dan inspektorat ketenagakerjaan juga harus bekerja bersama-sama untuk mendeteksi dan menanggapi pekerja anak. Anak-anak, keluarga dan masyarakat merupakan pusat dari sistem perlindungan anak dan berperan penting dalam menghentikan pekerja anak. Mekanisme berbasis masyarakat yang berfungsi dengan baik dapat meningkatkan kesadaran akan membahayakan pekerja anak.

- **Sosialisasi Perubahan Norma Sosial dan Budaya yang Mendukung Pekerjaan Anak, Dengan Fokus pada Gender**

Pemerintah dan organisasi berbasis masyarakat harus merancang dan menerapkan inisiatif pengasuhan anak dan pendidikan masyarakat untuk mengubah norma-norma sosial dan budaya yang berbahaya serta faktor-faktor penyebab terus berlanjutnya pekerja anak. Program sosial juga dapat mencakup komponen informasi dan perubahan perilaku untuk mencegah pekerja anak, mewajibkan pendidikan, dan terus mengenalkan tentang kesetaraan gender termasuk melalui intervensi sosial dan perubahan perilaku, seperti program pengasuhan anak, melawan norma gender yang tidak setara yang membebani pekerjaan rumah tangga di lingkungan mereka.

- **Mencegah Pekerjaan Anak Melalui Praktek Bisnis yang Bertanggung Jawab**

Pemerintah perlu terus memperkuat undang-undang dan mekanisme penegakan yang memerlukan transparansi dan uji tuntas hak asasi manusia dalam operasi bisnis dan rantai pasokan untuk bisnis dari semua ukuran,

secara nasional dan internasional. Hal ini termasuk pemerintah di negara-negara berpenghasilan tinggi dan menengah yang merupakan basis bagi banyak perusahaan internasional. Tanggung jawab bisnis dalam kaitannya dengan pekerjaan yang layak dan upah hidup, cuti hamil, dan pensiunan yang dibayar. Isu-isu ini melibatkan kebijakan pemerintah dan implementasi sektor swasta, dimana sektor bisnis menawarkan pemantauan dan pelaporan pekerja anak, hal ini biasanya dilakukan berbasis wilayah dan berfokus pada semua bentuk resiko perlindungan anak dan terintegrasi dengan sistem perlindungan anak dan perlindungan sosial. Memastikan praktik pembelian yang bertanggung jawab yang mengurangi tekanan ekonomi, volatilitas, dan ketidakpastian bagi mitra bisnis dan pemasok juga penting. Selain itu, bisnis juga dapat mendukung kapasitas rantai pasok di seluruh dunia sehingga dapat mengatasi akar permasalahan ekonomi di masyarakat luas dan ekosistem bisnis. Perhatian khusus harus diberikan kepada usaha mikro dan kecil, termasuk di sektor informal yang beroperasi di tingkat rantai pasokan yang lebih rendah dimana resiko pekerja anak sering kali paling menonjol. Melibatkan sektor swasta dan pemerintah dalam pendekatan terpadu mampu melihatkan kemajuan yang berkelanjutan.

5.4 Peran India Dalam Menghentikan Pekerja Anak

Pada tahun 2020, India membuat kemajuan moderat dalam upaya untuk menghapuskan pekerja anak. Pemerintah India menghabiskan \$13,5 juta dalam pendanaan untuk memperluas unit Anti Perdagangan Manusia dari 332 distrik ke 732 distrik dan memberikan tambahan pelatihan dan sumber daya untuk unit yang ada. Pada bulan Maret 2020, Pemerintah Karnataka merilis standar yang komprehensif, yaitu prosedur operasi untuk mencegah perdagangan manusia yang bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil. Operasi ini mencakup perdagangan anak untuk prostitusi, pengemis anak, pekerja anak, dan kerja terikat. Selain itu, Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Kode Kondisi Kerja yang mencakup keselamatan kerja standar untuk anak-anak usia 14-18 telah di sahkan pada bulan September 2020. Anak-anak di India terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya, seperti produksi garmen, penambangan mika, bekerja di perkebunan,

dan lain-lain, bahkan anak-anak diperdagangkan untuk eksploitasi seksual komersial dan untuk kerja penjadi pelayan rumah tangga (Trafficiking in Person Report-2020: India, 2020). Sebagian perdagangan tenaga kerja dilakukan di dalam negeri terutama di Bihar, Jharkhand, Chattisgarh, dan Odisha. Anak-anak dari daerah pedesaan India bermigrasi ke pusat perkotaan atau diperdagangkan untuk pekerjaan di pabrik, perkebunan, dan pertambangan dan mereka bekerja di lingkungan yang berbahaya dengan sedikit bahkan tanpa bayaran. Anak-anak juga dipaksa bekerja sebagai buruh terikat di berbagai sektor pekerjaan untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya atau untuk membayar utang keluarga. Keluarga yang terjerat hutang biasanya memperdagangkan anaknya untuk menjadi pekerja. Anak-anak korban eksploitasi seksual komersial, kerja paksa, dan perdagangan anak biasanya berasal dari kelompok yang terpinggirkan, seperti Hindu kasta rendah, agama minoritas, suku minoritas.

Terlepas dari pengesahan Undang-Undang Hak atas Pendidikan oleh Palemen pada tahun 2009 yang memberikan kebebasan dan wajib pendidikan untuk anak di bawah usia 14 tahun, ada beberapa hambatan akses pendidikan di India. Beberapa kendalanya adalah kurangnya anggaran, sekolah, guru terlatih, infrastruktur yang memadai, dan transportasi. Selanjutnya, anak-anak dari marjinal kelompok menghadapi hambatan tambahan untuk mengakses Pendidikan. Guru terkadang mengarahkan anak-anak ini ke diskriminasi dan pelecehan, sebagai contoh anak-anak di kasta rendah di beberapa sekolah di Madhya Pradesh dan Uttar Pradesh dilaporkan dipisahkan di ruang kelas. Selain itu, pengungsi yang tidak memiliki visa yang hanya memiliki kartu identitas dari UNCHR seringkali tidak dapat mengakses layanan pendidikan. Pemerintah India hingga saat ini tidak pernah mengumpulkan atau mempublikasi data secara khusus tentang pekerja anak yang eksploratif dan juga tidak menyediakan data mentah dari sensus nasional (Trafficiking in Person Report-2020: India, 2020).

Pemerintah India telah menetapkan peraturan perundang-undangan terkait pekerja anak. Namun, masih ada celah dalam kerangka hukum India untuk melindungi anak dari bentuk-bentuk pekerja anak, termasuk larangan perekrutan anak oleh kelompok bersenjata non-negara.

Standard	Meets International Standards	Age	Legislation
Minimum Age for Work	Yes	14	Section 3(1) of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act (71)
Minimum Age for Hazardous Work	Yes	18	Section 3A of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act (71)
Identification of Hazardous Occupations or Activities Prohibited for Children	Yes		Schedule to the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act; The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code (72,73)
Prohibition of Forced Labor	Yes		Section 4 of the Bonded Labour System (Abolition) Act; Sections 370 and 374 of the Penal Code; Section 79 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act (74-76)
Prohibition of Child Trafficking	Yes		Sections 366A, 366B, 370, 372, and 373 of the Indian Penal Code; Section 5 of the Immoral Traffic (Prevention) Act (75,77)
Prohibition of Commercial Sexual Exploitation of Children	Yes		Sections 366A, 366B, 370A, 372, and 373 of the Indian Penal Code; Sections 4–7 of the Immoral Traffic (Prevention) Act; Sections 13–15 of the Protection of Children from Sexual Offences Act; Section 67B of the Information Technology Act (75,77-79)
Prohibition of Using Children in Illicit Activities	Yes		Sections 76 and 78 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act; Section 32B(c) of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act (76,80)
Minimum Age for Voluntary State Military Recruitment	Yes	16	Military Rules(81)
Prohibition of Compulsory Recruitment of Children by (State) Military	N/A*		
Prohibition of Military Recruitment by Non-state Armed Groups	No		
Compulsory Education Age	Yes	15	Section 3 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act (82)
Free Public Education	Yes		Section 3 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act (82)

Tabel 1. 1 Hukum dan Regulasi Pekerja Anak India

Sumber : Government of India, and Ministry of Defense. Annual Report 2012-13. 2013. [Annual Report | Ministry of Defence \(mod.gov.in\)](http://www.mod.gov.in)

Kode Keselamatan, Kesehatan, dan Kondisi Kerja telah disahkan pada September 2020 dan menyatakan bahwa pemerintah pusat akan mendeklarasikan standar untuk larangan pekerja anak dan larangan mempekerjakan anak-anak usia 14 sampai 18 tahun di industri-industri tidak ramah anak. Kode ini juga menetapkan bahwa anak-anak di usia 14 hingga 18 tahun berhak atas 1 hari cuti untuk setiap 15 hari kerja (Government of India, 2020). Selain itu, kode ini memungkinkan pemerintah negara bagian untuk lebih menegakkan perlindungan khusus bagi pekerja anak usia 14 hingga 18 tahun. Namun kode ini masih belum berlaku secara maksimal yang dibuktikan dengan masih banyaknya anak-anak yang bekerja di industri-industri berbahaya tanpa perlengkapan keselamatan. Pemerintah India juga membuat RUU Perdagangan Manusia yang disusun pada tahun 2018. RUU ini dibentuk untuk meningkatkan hukuman bagi pelaku perdagangan manusia. RUU ini dibawa ke Parlemen India pada tahun 2018 setelah konsultasi dengan organisasi masyarakat sipil dan para penyintas. RUU ini masih melalui proses peninjauan internal berulang.

India telah mengusulkan untuk mendirikan 389 pengadilan khusus jalur cepat yang didedikasikan untuk kasus POCSO (*The Protection of Children from Sexual Offences*) (Pandit, 2021). Namun pada kenyataannya hingga September 2020 hanya ada 321 pengadilan jalur cepat POCSO yang telah dibentuk. Bahkan hakim dan jaksa di pengadilan POCSO tidak memiliki pelatihan atau keahlian dalam kejahatan POCSO. Untuk mengatasi hal ini, akademi kepolisian Madhya Pradesh menandatangani kesepakatan dengan sebuah LSM yang memungkinkan 1900 polisi, jaksa, dan petugas kehakiman untuk dilatih tentang POCSO. Selain itu, empat negara bagian telah menerapkan ruang sidang atau prosedur yang ramah anak. Operasi anti perdagangan manusia dan anti kerja paksa melibatkan dukungan LSM dan lembaga internasional. Pemerintah Delhi telah mengeluarkan standar operasional prosedur (SOP) untuk bantuan keuangan kepada korban kerja paksa. Namun, beberapa wilayah di India tidak memiliki SOP yang sama sehingga terkadang gagal untuk mengidentifikasi suatu kasus terkait pekerja anak.

Upaya untuk membantu korban pekerja anak juga dilakukan oleh beberapa aktor pemerintahan. Sebagai contoh yang dilakukan oleh Kementerian Perkeretaapian India berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dengan membentuk pos bantuan anak di stasiun untuk menampung laporan anak-anak tanpa pendamping yang rentan terhadap perdagangan manusia. Contoh lain adalah Badan Investigasi Nasional di Jharkand yang mengambil alih kasus perdagangan manusia pada bulan Juni 2020 dan mendakwa empat orang atas kasus ini pada Februari 2021 (CRC, 2020). Penegakan hukum perburuhan diawasi oleh Kementerian Tenaga Kerja, sedangkan penegakan hukum pidana diawasi oleh polisi. Petugas penegak hukum biasanya berkoordinasi dengan wilayah-wilayah di India melalui Kantor Kejaksaan Negeri.

Pemerintah India telah membentuk mekanisme untuk mengoordinasikan upaya untuk menangani pekerja anak dengan membentuk beberapa lembaga, antara lain (CRC, 2020):

1. Gugus Tugas untuk Melaksanakan UU Pekerja Anak

Gugus ini bertugas untuk mengkoordinasikan mekanisme pengawasan untuk memastikan pelaksanaan yang efektif untuk mengatasi pekerja anak dan remaja yang dipimpin oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan terdiri dari 12

pejabat pemerintah federal dan negara bagian. Kegiatan gugus ini adalah menginstruksikan negara bagian untuk memantau dengan cermat masalah pekerja anak dan memastikan penegakan hukum yang berkelanjutan terutama di wilayah-wilayah ekonomi rendah.

2. Dewan Penasehat Pusat Buruh Anak dan Remaja

Dewan Penasehat bertugas untuk mengumpulkan anggota dewan untuk meninjau pelaksanaan undang-undang dan program yang ada terkait dengan pekerja anak dan mengusulkan langkah-langkah baru.

3. Komisi Nasional untuk Perlindungan Hak Anak

Memastikan bahwa semua undang-undang, kebijakan, program, dan mekanisme administrasi sesuai dengan perlindungan konstitusional untuk anak-anak. Mengevaluasi pelanggaran dan kegagalan perlindungan hak anak.

4. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Memantau pelaksanaan undang-undang, memantau tindakan pemerintah negara bagian untuk mengidentifikasi, membebaskan, dan merehabilitasi korban pekerja anak melalui pengajuan triwulan, eksplorasi dan misi investigasi.

5. Platform Online untuk Menangani Buruh Anak

Portal online yang di operasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang memungkinkan pejabat pemerintah, LSM, dan penegak hukum untuk berbagi informasi dan saling berkoordinasi dalam kasus pekerja anak di tingkat nasional.

Kebijakan juga telah ditetapkan terkait pekerja anak, namun ada kesenjangan kebijakan yang menghambat upaya untuk mengatasi pekerja anak, termasuk kurangnya rencana aksi negara untuk penghapusan pekerja anak. Pada tahun 2020, pemerintah mendanai dan berpartisipasi dalam program yang mencakup tujuan menghilangkan atau mencegah pekerja anak. Namun, terdapat hambatan dalam pelaksanaan program sosial ini, termasuk pengawasan terhadap program-program rumah penampungan yang didanai pemerintah dan dikelola swasta yang memberikan bantuan kepada korban pekerja anak. Beberapa program sosial yang dibentuk oleh pemerintah India untuk mengatasi pekerja anak antara lain (CRC, 2020):

- **Proyek Nasional Pekerja Anak**
Program Kementerian Ketenagakerjaan yang beroperasi di tingkat kabupaten untuk mengidentifikasi anak-anak yang bekerja dan menarik mereka dari pekerjaan yang berbahaya serta memberikan pendidikan dan pelatihan kejuruan untuk bekal mereka di kemudian hari. Menyiapkan dan mengelola sekolah, menggiring anak-anak untuk bersekolah dengan memberikan mereka jaminan kesehatan, makanana, dan tunjangan lainnya.
- **Program Perlindungan Anak Terpadu**
Skema Perlindungan Anak Terpadu memberikan perlindungan kepada anak-anak dan menarik mereka dari pekerja anak, kerja paksa, dan perdagangan manusia. Anak-anak akan ditampung di rumah perlindungan dan terjamin kehidupannya. Program ini juga memberikan layanan rehabilitasi dan reintegrasi kepada anak-anak untuk lebih membentuk karakter anak. Program ini juga memiliki layanan telepon darurat bebas pulsa 24 jam yang disebut Childline. Layanan telepon ini tersebar diseluruh India untuk memudahkan pengaduan pekerja anak. Trackchild adalah portal online yang dimiliki program ini yang berfungsi untuk melacak anak hilang dan memfasilitasi berbagi informasi tentang anak hilang.
- **Skema Sektor Pusat untuk Rehabilitasi**
Ini merupakan salah satu program Kementerian Ketenagakerjaan India untuk menyelamatkan dan merehabilitasi korban pekerja anak dan dewasa yang mengalami kekerasan dan ketidakadilan. Program ini menyediakan keselamatan pekerja dengan memberikan bantuan keuangan dan layanan perlindungan sosial (Ministry of Labour and Employment, 2019). Mendukung pendanaan survei di tingkat kabupaten tentang prevalensi kerja terikat dan rehabilitasi.
- **Anti Perdagangan Manusia**
Kegiatan anti perdagangan manusia yang di operasikan oleh Kementerian Perempuan dan Perkembangan Anak India bekerjasama dengan LSM (Ministry of Woman and Child Development, 2018). Mendukung proyek untuk membantu mengintegrasikan kembali, merehabilitasi, dan memulangkan korban perdagangan manusia, termasuk skema Ujjawala dan

Swadhar Greh. Ujjawala adalah skema komprehensif yang dibuat pada tahun 2007 dan bertujuan untuk memerangi perdagangan manusia dan eksploitasi seksual komersial. Sedangkan skema Swadhar Greh menyediakan tempat tinggal sementara, akomodasi, dan layanan termasuk pelatihan kejuruan, bantuan hukum, dan layanan konseling rehabilitasi kepada perempuan dan anak-anak yang sudah diselamatkan dari perdagangan manusia dan eksploitasi seksual komersial.

- Freedom Project (2018-2023)

Freedom Project merupakan program kemitraan yang dikembangkan oleh Kementerian Luar Negeri dengan ILO. Project ini bertujuan untuk mengurangi kerentanan terhadap perdangan dan kerja paksa perempuan dan anak-anak di seluruh jalur migrasi melalui strategi terpadu dari perlindungan sosial yang ditargetkan dan advokasi kebijakan berbasis bukti untuk pekerjaan yang layak bagi para migran (ILO).

- Pengukuran dan Peningkatan Kesadaran Keterlibatan Pekerja Anak

Proyek ini didanai oleh U.S Department of Labor (USDOL) dan dilaksanakan oleh ILO untuk melakukan penelitian dan mengembangkan survei baru yang kemudian akan menjadi bahan dalam memperkuat kebijakan tentang pekerja anak. Di India, proyek ini telah diterapkan di Bihar, Chhattisgarh, dan Uttar Pradesh. Selama periode pelaporan, pemerintah bekerja sama dengan ILO untuk mengembangkan manfaat yang komprehensif bagi pekerja anak dan keluarganya (ILO, 2020).

Berdasarkan penjelasan tentang upaya UNICEF untuk mengatasi pekerja anak di India yang dalam realisasinya juga diperlukan upaya India sendiri untuk melancarkan dukungan UNICEF, peneliti dapat menganalisis menggunakan teori organisasi internasional. Peneliti menggunakan penjelasan dari Clive Archer tentang organisasi internasional yang memiliki tiga peran utama, yang **pertama** adalah instrumen, instrumen berarti suatu alat ataupun sarana yang dapat digunakan oleh anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu dengan menyelaraskan tindakan dari para anggotanya. Kasus pekerja anak tidak hanya ada di India, hampir di seluruh negara dengan ekonomi rendah terdapat pekerja anak. Dari sini, UNICEF membuat program berskala internasional untuk membantu mengatasi pekerja anak

namun tetap dengan bantuan negara-negara yang terdapat kasus pekerja anak. Karena disetiap negara memiliki peraturan masing-masing dan program tersebut juga akan menyesuaikan negara yang dituju. Yang kedua adalah arena, arena adalah adanya peran organisasi internasional untuk mampu mengadakan forum yang netral dimana dalam forum tersebut dapat digunakan sebagai lahan berargumentasi satu dengan yang lain. Seringkali organisasi internasional memainkan dua peran sekaligus, yakni memberikan saran atas kerjasama diantara negara-negara anggota dan aktor non-state sembari memainkan perannya sebagai instrumen bagi negara-negara anggotanya. Peran arena ini telah dilakukan oleh UNICEF dalam mengatasi masalah pekerja anak di India. UNICEF tidak sendiri dalam memperjuangkan hak anak. Dibantu dengan ILO, UNHR untuk melihat faktor-faktor penyebab terlibatnya anak-anak di dunia kerja. ILO juga memiliki program untuk meniadakan pekerja anak, namun karena penelitian ini perfokus pada UNICEF, peneliti tidak menuliskan lebih detail tentang upaya ILO dalam kasus ini. Yang **ketiga** adalah aktor yang artinya adalah organisasi internasional mampu bersifat independen atau mandiri dimana mereka dapat bertindak tanpa adanya intervensi ataupun arahan dari pihak manapun sehingga mereka juga bisa menjadi perintis bagi pembuat kebijakan yang mana akan diterapkan dalam suatu negara. UNICEF memiliki banyak program untuk meniadakan pekerja anak dengan berbagai pendekatan, seperti program perlindungan sosial inklusif multisektor, dan pendekatan terpadu. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi negara-negara yang memiliki masalah pekerja anak, terutama India. Yang hasilnya adalah India mulai lebih tegas membuat kebijakan dan mengkoordinasikan seluruh wilayah untuk lebih peka dalam mengindikasikan pekerja anak pada tahun 2018. Maka peran ketiga dianggap sangat penting untuk mempengaruhi suatu negara dalam membuat kebijakan.